

# MENUMBUHKAN EKONOMI LOKAL

*Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan*



Editor:  
Dr. Suryanto  
Prof. Dr. Tulus Tambunan

**MENUMBUHKAN EKONOMI LOKAL**  
**Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Suryanto, dkk.**

**MENUMBUHKAN EKONOMI LOKAL**  
**Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan**

**Buku ini diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan IRSA ke-14  
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret  
dan didanai oleh Badan Kebijakan Fiskal  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

**UNS PRESS**

**Menumbuhkan Ekonomi Lokal  
(Bukan Seperti Cendawan di Musim Hujan)**

Hak Cipta©Suryanto, dkk. 2018

**Penulis**

Suryanto	Sutomo
Tulus Tambunan	Agung Slamet Sukardi
M. Yusuf Indra Purnama	Dowes Ardi Nugroho
Rochmat Aldy Purnomo	Fitria Nur Rahmawati
Nurul Istiqomah	Dwi Prasetyani
Izza Mafruhah	Khusnul Ashar
Adenantha L. Dewa	Susilo
Lukman Hakim	Mutifiah
Bhimo Rizky Samudro	Tri Mulyaningsih
Dinarjati Eka Puspitasari	Fatimah
Yogi Pasca Pratama	Wahyu Prasetyo Widodo
Akhmad Daerobi	Malik Cahyadin
Hermada Dekiawan	Ida Busnety
Mulyanto	Johadi
Yunastiti Purwaningsih	

**Editor**

Suryanto  
Tulus Tambunan

**Ilustrasi Sampul**

UNS Press

**Penerbit dan Percetakan**

Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press)  
Jalan Ir. Sutami 36 A, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia  
57126  
Telepon (0271) 646994 Psw. 341 Fax. (0271) 7890628  
Website : [www.unspress.uns.ac.id](http://www.unspress.uns.ac.id)  
Email : [unspress@uns.ac.id](mailto:unspress@uns.ac.id)

Cetakan 1, Edisi I, Juni 2018  
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
*All Rights Reserved*

**ISBN 978-602-397-178-7**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga buku bunga rampai ini terselesaikan dapat diterbitkan. Buku bunga rampai ini adalah kumpulan dari tulisan para akademisi dari beberapa perguruan tinggi yaitu Universitas Sebelas Maret, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Trisakti Jakarta, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas Brawijaya, dan praktisi.

Ekonomi lokal adalah ekonomi yang tumbuh berdasarkan kekuatan dan keunikan masyarakat lokal. Pengembangan ekonomi lokal menurut Bank Dunia adalah upaya untuk mengembangkan usaha bisnis melalui pengoptimalan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah, perwilayahan komoditas (*clustering*), tata ruang, dan regionalisasi ekonomi.

Menumbuhkan ekonomi lokal tidak dapat berharap seperti tumbuhnya cendawan di musim hujan, karena tumbuhnya ekonomi lokal tidak mengenal musim tertentu. Ekonomi lokal tumbuh karena proses yang lebih lama dan kekuatan ekonomi lokal adalah kekhasan yang dimiliki. Ide membuat bunga rampai ini adalah karena tumbuhnya ekonomi lokal memiliki variasi yang unik (khas) seperti meneguhkan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya, Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, dan keunikan setiap daerah.

Harapannya buku bunga rampai ini dapat menjadi sarana saling tukar pandangan dan semoga menjadi secuil inspirasi untuk para akademisi dan praktisi. Inspirasi untuk dapat membantu pengembangan dan penguatan ekonomi lokal di daerah-daerah lain di Indonesia.

Akhirnya, buku bunga rampai ini tidak dapat terselesaikan apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Pertama ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak Prodi Ekonomi Pembangunan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS atas segala fasilitas yang diberikan. Kedua, para kontributor tulisan yang menjadikan buku bunga rampai ini menjadi lebih berwarna. Ketiga, kepada pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga bantuannya tercatat sebagai amal baik. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam buku bunga rampai ini saya selaku editor mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, Juni 2018

Suryanto

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi

## BAGIAN I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN	
Suryanto, Tulus Tambunan .....	1

## BAGIAN II EKONOMI KREATIF

BAB II	Ekonomi Kreatif Sumber Perkembangan Ekonomi Desa Tulus Tambunan .....	9
BAB III	<i>Smart Economy</i> untuk Penguatan Ekonomi Lokal Kota Surakarta M. Yusuf Indra Purnama, Suryanto .....	45
BAB IV	Seni Reyog Ponorogo dalam Perspektif Strategi Pelestarian dan Pengembangan Industri Kreatif Rochmat Aldy Purnomo, Suryanto .....	61
BAB V	Konsep <i>Blue Economy</i> dalam Mewujudkan Desa Mandiri Energi Melalui Pemanfaatan Biogas Nurul Istiqomah, Izza Mafruhah.....	75
BAB VI	Peran Transportasi Laut pada Poros Maritim dalam Pengurangan Disparitas Antarwilayah di Indonesia Adenathera L. Dewa, Izza Mafruhah, Indah Susilowati .....	93

## BAGIAN III KELEMBAGAAN

BAB VII	Praktik-praktik Terbiak Pengelolaan Ekonomi Lokal di Subosuka Wonosraten Lukman Hakim .....	105
BAB VIII	Kearifan Lokal dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Ekonomi Politik dan Redulasi: Studi Kasus Tradisi Sasi di Maluku Bhimo Rizky S., Dinarhati Eka P., Yogi Pasca P. ....	113
BAB IX	Strategi Penguatan Kelembagaan Usahatani Akhmad Daerobi.....	123
BAB X	Kebutuhan Investasi untuk Pengembangan Ekonomi Lokal di Surakarta Suryanto, Hermada Dekiawan, Johadi.....	133

BAB XI	Kinerja Keuangan dan Tren Pendapatan Daerah dari Pos Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar Mulyanto, Lukman Hakim.....	155
BAB XII	Dampak Kenaikan Upah Minimum terhadap Relokasi Industri dan kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Yunastiti Purwaningsih, Sutomo .....	183

### **BAGIAN III KEWIRAUSAHAAN**

BAB XIII	Potensi Wisata Kuliner terhadap Penguatan Ekonomi Lokal Agung Slamet S., Doves Ardi N., Fitria Nur R.....	209
BAB XIV	Peran dan Perilaku Muslimah Pengusaha dalam Dinamika Kewirausahaan Dwi Prasetyani, Khusnul Ashar, Susilo, Multifiah.....	227
BAB XV	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Fasilitas Akses Kredit dan Pendampingan Usaha Tri Mulyaningsih, Fatimah .....	251
BAB XVI	Analisis Pengaruh PDRB dan UMK terhadap Pengangguran pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2016 Wahyu Prasetyo Widodo, Malik Cahyadin.....	269
BAB XVII	Pemetaan Produk-produk Unggulan di Provinsi Sumatera Barat: Hasil Sebuah Tinjauan Ulang dari Berbagai Sumber Tulus Tambunan, Ida Busteny .....	289



# **BAB X**

## **KEBUTUHAN INVESTASI UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI KOTA SURAKARTA**

**Suryanto  
Hermada Dekiawan  
Johadi**

### **A. Pendahuluan**

Investasi adalah prasyarat utama dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika kebutuhan pendanaan pembangunan hanya dari pemerintah maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak sesuai dengan target. Kemampuan pemerintah yang terbatas dalam penganggaran harus diimbangi dengan peningkatan kesempatan berinvestasi dari swasta.

Investasi dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Oleh karena, investasi merupakan pengeluaran yang akan menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat di mana pada akhirnya akan menambah pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Iklm investasi yang baik akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, yakni melalui investasi yang didukung oleh produktivitas yang tinggi. Selain iklim investasi yang baik, faktor yang diduga berpengaruh adalah kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia.

Menurut teori Harrod Domar, investasi merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi sebab investasi dapat menciptakan pendapatan dan dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Kegiatan investasi merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembangunan karena investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu, yang diharapkan

dari investasi adalah dampak yang ditimbulkan dari investasi terhadap pembangunan wilayah regional maupun nasional.

Todaro (2000) menjelaskan bahwa salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal (*capital accumulation*), yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumberdaya manusia. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar *output* dan pendapatan dikemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku meningkatkan stok modal (*capital stock*) secara fisik suatu negara dan hal itu jelas memungkinkan akan terjadinya peningkatan *output* di masa-masa mendatang.

Bab ini mengangkat beberapa masalah antara lain berapa nilai investasi yang dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi unggulan di Kota Surakarta dan penyerapan tenaga kerja berdasarkan masing kategori ekonomi unggulan di Kota Surakarta. Lebih khusus lagi investasi yang diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi lokal.

## **B. Investasi dan Pembangunan Ekonomi Daerah**

Kota Surakarta sebagai salah satu bentuk daerah didasarkan pada pengelompokkan administrasi. Jadi Kota Surakarta merupakan daerah yang termasuk dalam kelompok daerah perencanaan dan bukan termasuk dalam daerah yang memiliki kesamaan sifat atau ekonomi ruang yang menguasai beberapa pusat kegiatan ekonomi yaitu (Arsyad, 1999).

Masalah pokok dalam pembangunan di Kota Surakarta dan juga daerah yang lain adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumber fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi di Kota Surakarta dalam RPJMD 2016-2021 memiliki visi “TERWUJUDNYA SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA” dapat diartikan sebagai suatu cita-cita untuk mencapai Kota Surakarta yang menonjolkan sisi budaya dengan diikuti oleh kemajuan secara ekonomi. Misi untuk mencapai cita—cita tersebut diformulasikan dalam 3 WMP (Wasis, Waras, Wareg, Mapan dan Papan. 3WMP di Surakarta diwujudkan dalam

kegiatan untuk pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Pembentukan institusi baru seperti Technopark diharapkan dapat menjadi pusat alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Sementara itu, pembangunan institusi pendidikan baru seperti Akademi Pertekstil diharapkan dapat menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik serta pengembangan wirausaha-wirausahawan baru berdasarkan kekuatan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan mempersempit kesenjangan ekonomi.

Langkah selanjutnya adalah pengembangan ekonomi daerah menjadi kekuatan ekonomi baru bagi daerah. Upaya yang dapat dilakukan dapat diciptakan dengan cara mempertinggi peranan kategorial dan memodernkan keseluruhan kegiatan ekonomi. Usaha ini perlu untuk mencapai dua tujuan. Pertama, langkah tersebut perlu untuk menjaga agar jenis ekspor diperbanyak dan dengan demikian dapat mengurangi guncangan yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi di luar daerah terhadap perekonomian daerah tersebut, terutama perubahan yang secara langsung mempengaruhi ekspor daerah tersebut.

Dampak positif penguatan ekonomi daerah tersebut adalah efek *multiplier* dari bergeraknya roda ekonomi yang digerakkan oleh masyarakat tersebut. Semakin baik produk yang dihasilkan akan meningkatkan permintaan produk di pasar. Apabila produk dapat diterima dengan baik oleh pasar termasuk pasar ekspor maka dampak berikutnya adalah pertumbuhan konsumsi barang dan jasa masyarakat Kota Surakarta.

Menurut Bappenas pengembangan ekonomi lokal dapat ditempuh dengan memperbesar partisipasi dari modal daerah tersebut dalam pengembangan kategori ekspor. Peran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi semakin penting karena garda depan masuknya investasi melalui DPMPTSP. Investasi menjadi modal dasar karena dapat mengurangi pengaliran pendapatan dan keuntungan keluar daerah dan selanjutnya akan memperbesar pendapatan masyarakat di daerah yang akhirnya akan memperbesar efek *multiplier* bagi Kota Surakarta.

### **C. Kinerja Kategori dan Subkategori Ekonomi**

Perekonomian Kota Surakarta didominasi oleh kategori konstruksi, kategori perdagangan, serta kategori informasi dan komunikasi. Hal ini

terlihat dari besarnya kontribusi kategori-kategori tersebut dalam PDRB. Pada tahun 2010 misalnya, kontribusi kategori konstruksi mencapai 28,23 persen, kategori perdagangan 23,82 persen, serta kategori informasi dan komunikasi mencapai 11,36 persen. Dengan demikian kontribusi ketiga kategori tersebut dalam PDRB tahun 2010 mencapai 63,41 persen. Bila ditambah dengan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum yang besarnya 4,87 persen maka kontribusinya menjadi 68,28 persen. Hal ini menggambarkan bahwa Kota Surakarta merupakan kota perdagangan dan jasa.

Kategori industri pengolahan yang pada tahun 2010 mencapai 7,62 persen tidak mendominasi struktur PDRB. Kontribusi kategori industri pengolahan dengan kategori konstruksi, kategori perdagangan, serta kategori informasi dan komunikasi terlihat cukup besar. Di Surakarta kategori industri pengolahan didominasi oleh subkategori industri makanan dan minuman, subkategori industri tekstil dan pakaian jadi, serta subkategori pengolahan tembakau.

Pada tahun 2016 terjadi perubahan struktur ekonomi di berbagai kategori bila dibandingkan tahun 2010. Selama kurun waktu 6 tahun tersebut kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan rata-rata pertumbuhan proporsi yang negatif yaitu -2,20 persen. Hampir semua subkategori menunjukkan proporsi yang semakin kecil, terutama subkategori tanaman pangan yang proporsinya rata-rata menunjukkan pertumbuhan -10,10 persen. Hanya subkategori jasa pertanian dan perburuan yang memiliki rata-rata pertumbuhan proporsi positif meski sangat kecil yaitu 0,41 persen. Rata-rata pertumbuhan subkategori yang negatif ini juga terjadi pada kategori-kategori ekonomi lainnya. Di kategori industri pengolahan, meski sangat kecil terjadi rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 0,46 persen. Subkategori yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan proporsi negatif terbesar adalah subkategori industri kertas dan barang dari kertas, percetakan yaitu -3,96 persen. Subkategori ini selama 2010-2015 menunjukkan tren negatif, namun dari 2015-2016 terjadi tren positif dalam hal proporsi terhadap PDRB.

Tabel 10.1  
Proporsi PDRB Kota Surakarta 2010-2016  
Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Proporsi 2010-2016	Rata-rata Pertumbuhan Proporsi 2010-2016 (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,50	0,51	0,49	0,49	0,47	0,46	0,44	0,48	-2,20
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,23
Industri Pengolahan	7,62	7,64	7,77	7,97	8,09	7,96	7,84	7,84	0,46
Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,22	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,23	0,22	0,20	0,18	0,18	0,17	0,17	0,19	-4,66
Konstruksi	28,23	27,03	27,00	26,40	25,99	25,97	26,25	26,70	-1,20
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,82	24,72	23,89	24,16	23,93	23,63	23,46	23,94	-0,25
Transportasi dan Pergudangan	2,64	2,59	2,61	2,71	2,79	2,87	2,87	2,73	1,42
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,87	4,95	5,05	5,03	5,11	5,14	5,13	5,04	0,88
Real Estate	4,23	4,25	4,31	4,27	4,32	4,39	4,45	4,32	0,80
Jasa Perusahaan	0,64	0,66	0,67	0,69	0,70	0,73	0,75	0,69	2,81
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	6,46	6,24	6,01	5,88	5,65	5,71	5,54	5,93	-2,52
Jasa Pendidikan	3,66	3,89	4,07	4,14	4,24	4,30	4,24	4,08	2,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,90	0,92	0,93	1,00	1,00	1,02	0,95	3,02
<b>PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.

Selanjutnya, data subkategori perhatikan Lampiran 1

Berdasarkan informasi dari Tabel 10.1 dapat diketahui bahwa kategori konstruksi yang memiliki kontribusi besar bagi PDRB Kota Surakarta menunjukkan pertumbuhan kontribusi yang negatif. Kategori pertanian dan pertambangan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang negatif karena karakteristik Kota Surakarta bukan penghasil tambang. Sub kategori asuransi dan dana pensiun memiliki rata-rata pertumbuhan output per tahun tertinggi yaitu 12,78 persen dan disusul kemudian subkategori industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 12,17 persen. Tinjauan terhadap kategori industri pengolahan, terdapat cukup banyak subkategori industri pengolahan yang memiliki rata-rata pertumbuhan di atas 5,00 persen.

Tabel 10.2  
Rata-rata Pertumbuhan 10 Sub Kategori Periode 2010-2016

No	Kategori/Subkategori	Rata-rata Pertumbuhan Output
1	Asuransi dan Dana Pensiun	12,78
2	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	12,17
3	Jasa Keuangan Lainnya	10,44
4	Jasa Penunjang Keuangan	9,31
5	Angkutan Rel	9,16
6	Industri Makanan dan Minuman	8,92
7	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,90
8	Jasa Perusahaan	8,69
9	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	8,59
10	Informasi dan Komunikasi	8,36

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2016 diolah

Dengan melihat proporsi dan pertumbuhan, dapat dijadikan sebagai indikasi adanya pergeseran struktur perekonomian di Kota Surakarta. Kategori perdagangan, industri, dan informasi merupakan kategori yang menjadi tulang punggung perekonomian Kota Surakarta. Pertumbuhan output kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan misalnya dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan, sedangkan industri pengolahan dari 2010-2013 menunjukkan peningkatan namun setelah 2013 pertumbuhan output cenderung mengalami penurunan. Penurunan di kategori industri pengolahan tersebut terjadi pada semua subkategori. Penurunan terbesar terjadi pada subkategori industri tekstil dan pakaian jadi, dari 15,10 persen di tahun 2013 menjadi hanya 2,52 persen di tahun 2014. Subkategori penyediaan akomodasi sejak 2011 hingga 2016 menunjukkan penurunan sementara subkategori penyediaan makan minum cenderung stabil. Persaingan yang semakin ketat di bidang tersebut merupakan salah satu faktor penyebab semakin menurunnya pertumbuhan subkategori penyediaan akomodasi.

#### **D. Analisis *Location Quotient* (LQ)**

Analisis LQ merupakan analisis untuk melihat keunggulan suatu kategori atau subkategori secara relatif dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas, seperti Kota Surakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Pada dasarnya analisis ini untuk melihat posisi suatu kategori atau subkategori tertentu di antara kategori atau subkategori yang sama di seluruh wilayah. Implikasi lain adalah untuk melihat kemampuan suatu kategori atau subkategori untuk memenuhi kebutuhan internal wilayah.

Berdasarkan nilai LQ, semua subkategori pertanian memiliki nilai LQ di bawah 1. Kecilnya nilai LQ tersebut mengindikasikan bahwa usaha-usaha di bidang pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhan internal Kota Surakarta, sehingga harus didatangkan dari wilayah lain, misalnya Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Ngawi, dan sebagainya. Di kategori industri pengolahan nilai LQ secara keseluruhan hanya sekitar 0,22. Terdapat dua subkategori yang memiliki nilai LQ di atas satu, yaitu subkategori industri pengolahan lainnya; jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, serta subkategori industri kertas dan barang dari kertas, percetakan. Tingginya nilai LQ menandakan bahwa di bidang kedua industri tersebut Kota Surakarta memiliki keunggulan di banding daerah lain di provinsi Jawa Tengah untuk jenis industri yang sama. Hal ini menjadikan Kota Surakarta mampu memenuhi kebutuhan dari kedua subkategori industri tersebut, serta mengekspor ke daerah lain. Subkategori industri dengan LQ sekitar 0,8 adalah industri karet, barang dari karet dan plastic serta subkategori industri tekstil dan pakaian jadi. Meski Kota Surakarta dikenal

sebagai kota tekstil, namun output tekstil masih lebih rendah dibandingkan dengan output tekstil daerah lain di Jawa Tengah.

Kategori konstruksi serta perdagangan memiliki nilai LQ yang tinggi. Demikian pula dengan *real estate*, angkutan rel (kereta api), penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa perusahaan, jasa pendidikan, serta kesehatan dan kegiatan sosial semuanya memiliki nilai LQ yang tinggi. Nilai LQ tertinggi adalah bidang penyediaan akomodasi. Kota Surakarta memiliki fasilitas akomodasi yang sangat memadai dengan tingkat hunian yang tinggi. Kondisi ini ditunjang dengan destinasi wisata mengingat Surakarta juga merupakan kota budaya.

Di dalam LQ dinamis, nilai untuk industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki di atas 1 yang menandakan bahwa di bidang industri tersebut Surakarta memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Provinsi Jawa Tengah. Demikian pula dengan beberapa bidang lain seperti industri kimia, farmasi dan obat tradisional; industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik; industri karet, barang dari karet dan plastic; industri mesin dan perlengkapan; serta industri furniture, yang semuanya memiliki nilai LQ dinamis di atas 1. Bila LQ kurang dari 1 namun LQ dinamis lebih besar dari 1 (seperti industri pengolahan lainnya; jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan) hal ini menggambarkan bahwa industri tersebut merupakan industri yang mampu memenuhi kebutuhan dalam Kota Surakarta, namun dibandingkan dengan daerah lain rata-rata pertumbuhannya masih lebih rendah.

Tabel 10.3  
Nilai LQ Statis dan LQ Dinamis 2010-2016  
Atas Dasar Harga Konstan 2010

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010 s.d. 2016	LQ Dinamis
<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	0,03	0,032	0,03	0,03	0,034	0,03	0,03	0,03	1,02
<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
<b>Industri Pengolahan</b>	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	1,02
<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	2,15	2,14	2,19	2,15	2,08	2,08	2,05	2,12	0,96



Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010 s.d. 2016	LQ Dinamis
<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah</b>	2,58	2,56	2,52	2,45	2,43	2,43	2,43	2,48	0,94
<b>Konstruksi</b>	2,73	2,69	2,66	2,61	2,59	2,58	2,57	2,63	0,94
<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil</b>	1,62	1,63	1,63	1,66	1,65	1,65	1,64	1,64	1,02
<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,86	0,97
<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	1,62	1,64	1,67	1,67	1,66	1,66	1,63	1,65	1,01
<b>Informasi dan Komunikasi</b>	3,40	3,38	3,44	3,41	3,28	3,20	3,13	3,30	0,92
<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	1,32	1,31	1,30	1,28	1,28	1,26	1,25	1,28	0,94
<b>Real Estate</b>	2,47	2,47	2,50	2,41	2,40	2,39	2,38	2,43	0,96
<b>Jasa Perusahaan</b>	2,22	2,23	2,23	2,15	2,13	2,15	2,10	2,17	0,95
<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan</b>	2,04	2,02	2,04	2,04	2,05	2,07	2,07	2,05	1,02
<b>Jasa Pendidikan</b>	1,39	1,32	1,24	1,21	1,19	1,18	1,14	1,22	0,82
<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	1,30	1,31	1,28	1,27	1,29	1,28	1,25	1,28	0,96

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.

## E. Analisis *Shift-Share*

Dari tinjauan *shift-share*, hanya sedikit yang memiliki nilai negatif yaitu subkategori tanaman pangan, subkategori kehutanan dan penebangan kayu, serta subkategori pertambangan dan penggalian. Semua kategori dan subkategori memiliki nilai regional share yang positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Jawa Tengah memberikan

dampak positif bagi perekonomian Surakarta. Sebagai ilustrasi nilai regional shift industri pengolahan sebesar 593 Miliar rupiah yang berarti kondisi perekonomian di Jawa Tengah mampu memberikan kontribusi terhadap output kategori industri pengolahan di Surakarta sebesar 593 Miliar rupiah. Sementara itu proportional shift menggambarkan pengaruh struktur ekonomi Kota Surakarta terhadap suatu kategori atau subkategori. Industri pengolahan misalnya memiliki nilai proportional shift sebesar 22,7 Miliar rupiah. Hal ini merupakan indikasi bahwa struktur perekonomian di Kota Surakarta mampu mendukung output industri sebesar Rp22,7 Miliar.

Nilai proportional shift negatif terjadi di beberapa jenis industri yaitu industri pengolahan tembakau, industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, industri kertas dan barang dari kertas, industri logam, industri karet, industri mesin dan perlengkapan, serta industri pengolahan lainnya. Hal ini merupakan indikasi bahwa struktur perekonomian yang ada tidak memberikan pengembangan industri-industri tersebut. Untuk *differential shift*, cukup banyak yang memiliki nilai negatif yang berarti daya kompetitif bidang-bidang tersebut masih belum tinggi atau masih kalah dibandingkan yang sejenis di wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian, meskipun kinerja kategori-kategori tersebut dari aspek rata-rata pertumbuhan dan proporsi tergolong baik atau tinggi, namun dibandingkan rata-rata daerah lain di Jawa Tengah masih kurang. Perkembangan yang terjadi masih dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Jawa Tengah serta struktur perekonomian Kota Surakarta, bukan karena daya kompetitifnya.

Secara keseluruhan, dinamika perekonomian Jawa Tengah memberikan dampak besar bagi perekonomian Kota Surakarta. Total nilai regional shift menunjukkan bahwa dari total output perekonomian Kota Surakarta yang tercermin melalui PDRB, sebesar Rp7,79 trilyun akibat pengaruh perekonomian Jawa Tengah dan Rp1,09 trilyun akibat struktur perekonomian internal Kota Surakarta.

Perhitungan shift-share dinamis memberikan gambaran apakah suatu subkategori tersebut terspesialisasi atau tidak, serta apakah suatu subkategori memiliki daya saing atau tidak dibandingkan dengan subkategori yang sama di Jawa Tengah. Nilai negatif efek spesialisasi menggambarkan bahwa subkategori tersebut bukan merupakan subkategori yang terspesialisasi di Surakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa subkategori tersebut belum menjadi subkategori yang “leading” dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Demikian pula dengan nilai efek kompetitif yang negatif memberikan gambaran bahwa subkategori tersebut memiliki daya saing yang lebih rendah dibandingkan subkategori sejenis di Jawa Tengah. Dengan demikian, ada kemungkinan suatu subkategori tersebut merupakan subkategori yang terspesialisasi di

Surakarta, namun daya saingnya rendah (nilai positif kecil) atau bahkan tidak memiliki daya saing (nilai negatif). Sebaliknya, ada kemungkinan suatu subkategori bukan merupakan kategori yang terspesialisasi di Surakarta, namun memiliki daya saing di banding subkategori sejenis di wilayah Jawa Tengah. Kategori yang unggulan merupakan kategori yang memiliki efek spesialisasi dan efek kompetitif yang keduanya positif.

Tabel 10.4  
*Shift-Share* Dinamis 2010-2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010

LAPANGAN USAHA		Efek Spesialisasi	Efek Kompetitif
<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>		-3,322,559	0.0538
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-2,971,295	0.0544
	a. Tanaman Pangan	-1,341,867	-0.3007
	b. Tanaman Hortikultura	-501,590	-0.1972
	c. Tanaman Perkebunan	-95,598	-0.6622
	d. Peternakan	-446,950	-0.1044
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	-56,840	0.0130
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	-137,391	0.0188
3	Perikanan	-213,873	-0.2584
<b>Pertambangan dan Penggalian</b>		-459,173	-0.5375
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-
3	Pertambangan Bijih Logam	-	-
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	-387,149	-0.4325
<b>Industri Pengolahan</b>		-5,775,907	0.0583
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman	-1,643,718	0.0350
3	Industri Pengolahan Tembakau	-1,358,400	0.0168
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-156,417	0.0168
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-24,667	0.0431
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-345,548	-0.0233

<b>LAPANGAN USAHA</b>		<b>Efek Spesialisasi</b>	<b>Efek Kompetitif</b>
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	54,177	-0.0145
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	-329,120	0.2775
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-20,709	0.0888
10	Industri Barang Galian bukan Logam	-138,455	-0.0692
11	Industri Logam Dasar	-67,661	-0.1258
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	-71,195	0.2150
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	-9,574	0.1248
14	Industri Alat Angkutan	-48,495	-0.0654
15	Industri Furnitur	-66,776	0.0341
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	16,922	0.0240
<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>		25,139	-0.0309
1	Ketenagalistrikan	25,131	-0.0339
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	8	0.0630
<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</b>		29,589	-0.0373
<b>Konstruksi</b>		3,840,867	-0.0506
<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>		1,955,105	0.0529
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	33,622	0.0064
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1,921,484	0.0599
<b>Transportasi dan Pergudangan</b>		-76,098	-0.0149
1	Angkutan Rel	4,952	0.0315
2	Angkutan Darat	-4,482	-0.0116
3	Angkutan Laut	-	-
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-

LAPANGAN USAHA		Efek Spesialisasi	Efek Kompetitif
5	Angkutan Udara	-	-
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	-2,744	-0.0290
<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>		398,233	0.0508
1	Penyediaan Akomodasi	354,462	-0.0254
2	Penyediaan Makan Minum	43,770	-0.0064
<b>Informasi dan Komunikasi</b>		1,721,869	-0.0972
<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>		189,335	-0.0458
1	Jasa Perantara Keuangan	90,860	-0.1186
2	Asuransi dan Dana Pensiun	28,372	0.0946
3	Jasa Keuangan Lainnya	70,035	-0.0798
4	Jasa Penunjang Keuangan	67	0.0273
<b>Real Estate</b>		539,920	-0.0191
<b>Jasa Perusahaan</b>		74,957	-0.0522
<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>		706,661	0.0479
<b>Jasa Pendidikan</b>		222,453	-0.3148
<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>		42,121	-0.0237
<b>Jasa lainnya</b>		-112,513	-0.0769
	PDRB	-0.0097	-1.0372

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2016 diolah

## F. Penentuan Potensi Ekonomi

Penentuan kriteria potensi ekonomi dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu: (a) kurang potensial, (b) potensi kecil, (c) potensi sedang, dan (d) potensi tinggi. Kriteria tersebut didasarkan pada indikator sebagai berikut: (a) nilai LQ, (b) nilai DLQ, (c) nilai rata-rata pertumbuhan, (d) efek spesialisasi, (e) efek kompetitif, dan (f) proporsi terhadap PDRB. Bobot masing-masing indikator diberikan secara arbitrer berdasarkan *professional judgement*, sebagai berikut:

Tabel 10.5. Ringkasan Hasil

No	Indikator	Bobot (%)
1	LQ	20
2	DLQ	10
3	Rata-rata Pertumbuhan	15
4	Efek Spesialisasi	20
5	Efek kompetitif	25
6	Proporsi terhadap PDRB	10

Bobot dapat diubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang selalu berjalan dinamis. Skor akhir diberikan berdasarkan pendekatan kuartil sebagai berikut:

Tabel 10.6. Penentuan Kelas Potensi

No	Indikator	Bobot (%)
1	Kuartil 1	Kurang Potensial
2	$(\text{Kuartil 1} + \text{Kuartil 2})/2$	Potensi Kecil
3	$(\text{Kuartil 2} + \text{Kuartil 3})/2$	Potensi Sedang
4	Kuartil 3	Potensi Tinggi

Penentuan potensi ekonomi dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kebutuhan investasi pada kategori potensial tersebut. Kebutuhan investasi di kategori potensial bukan berarti mengabaikan investasi di kategori yang lain, karena antar variable ekonomi memiliki keterkaitan *forward* dan *backward linkages*. PDRB mengukur output akhir dari saling keterkaitan antar kategori atau subkategori tersebut. Selain itu, melalui identifikasi potensi ekonomi, diharapkan kebijakan dan strategi dapat fokus pada bidang-bidang tersebut sehingga upaya pencapaian pendapatan perkapita sesuai target RPJMD dapat lebih efektif.

Berdasarkan perhitungan kuartil, diperoleh hasil perhitungan skor sebagai berikut:

Tabel 10.7  
Potensi Subkategori Ekonomi Kota Surakarta

Uraian	LQ	DLQ	RATA2 PERTUMBUHAN	EFEK SPESIALISASI	EFEK KOMPETITIF	PROPORSI	JUMLAH	SKOR	STATUS
<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>									Potensi Sedang
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0	1	0	0	1	0	2	0.35	Potensi Sedang
a. Tanaman Pangan	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Kurang Potensial
b. Tanaman Hortikultura	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Kurang Potensial
c. Perkebunan	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Kurang Potensial
d. Peternakan	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Kurang Potensial
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0	0	1	0	1	0	2	0.40	Potensi Sedang
2. Kehutanan dan Pencabangan Kayu	0	0	0	0	1	0	1	0.25	Potensi Kecil
3. Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Kurang Potensial
<b>Pertambangan dan Penggalian</b>									Kurang Potensial
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Kurang Potensial
<b>Industri Pengolahan</b>									Potensi Tinggi
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Industri Makanan dan Minuman	0	0	1	0	1	0	2	0.40	Potensi Sedang
3. Pengolahan Tembakau	0	0	0	0	1	0	1	0.25	Potensi Kecil
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0	0	1	0	1	0	2	0.40	Potensi Sedang
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0	1	1	0	1	0	3	0.50	Potensi Sedang
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Bar	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Kurang Potensial

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2016 diolah

Dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta 2016-2021, target pendapatan per kapita riil selama 2016-2021 disajikan pada tabel di bawah ini. Pendapatan per kapita riil merupakan pendapatan per kapita yang dihitung dengan menggunakan pendekatan harga konstan, sehingga hanya mendasarkan pada output perekonomian dan menghilangkan faktor inflasi atau kenaikan harga barang. Untuk dapat memenuhi target pendapatan per kapita tersebut, terdapat dua aspek yang dipertimbangkan yaitu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Dalam kajian ini, pertumbuhan ekonomi dipenuhi melalui kegiatan investasi sehingga akan menghasilkan informasi kebutuhan investasi yang diperlukan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi.

Tabel 10.8

Target Pendapatan Per Kapita dalam RPJMD Kota Surakarta 2016-2021

2017	2018	2019	2020	2021
60,922,565.68	63,823,145.56	66,534,165.91	69,337,235.56	72,163,382.69

Penentuan besarnya kebutuhan investasi didasarkan pada nilai ICOR. Hasil perhitungan ICOR adalah sebagai berikut:

$$ICOR = \Delta K / \Delta Y, \text{ karena } \Delta K = I \text{ maka } ICOR = I / \Delta Y$$

Dalam struktur PDRB,  $\Delta K$  atau Investasi adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Dengan demikian, kebutuhan investasi untuk setiap kategorial adalah:

$$PMBTB_i = \{(PMTB_{Total} / \Delta Y) \times g \times \Delta Y_i\} / g_i$$

$$PMTB_i = \text{Besarnya investasi pada kategori } i$$

$$PMTB_{Total} = \text{Besarnya investasi total}$$

$$g = \text{pertumbuhan ekonomi}$$

$$g_i = \text{pertumbuhan ekonomi kategori } i$$

$$\Delta Y = \text{Pertambahan PDRB}$$

$$\Delta Y_i = \text{Pertambahan PDRB kategori } i$$

Hasil perhitungan ICOR Kota Surakarta selama 2010-2016 dengan menggunakan pendekatan harga berlaku rata-rata adalah 6,8. Nilai ICOR ini termasuk sangat tinggi, artinya untuk menghasilkan output sebesar Rp 1 dibutuhkan investasi sebesar Rp 6,8. Hal ini mengindikasikan adanya inefisiensi karena tingginya nilai ICOR. Semakin tinggi nilai ICOR semakin



besar adanya inefisiensi yang terjadi dan semakin kecil nilai ICOR, semakin tinggi tingkat efisiensi. Tinggi rendahnya efisiensi tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya faktor proses perizinan, kenaikan biaya produksi, atau faktor tingkat persaingan usaha yang semakin ketat. Dengan tingkat persaingan yang semakin ketat, diperlukan upaya yang semakin besar untuk menghadapi persaingan tersebut. Kajian yang pernah dilakukan oleh DPMPTSP Kota Surakarta menunjukkan bahwa kinerja DPMPTSP Kota Surakarta menurut investor atau pelaku usaha adalah bagus dalam pelayanan perizinan. Dengan demikian, inefisiensi yang muncul bukanlah disebabkan oleh masalah perizinan tersebut tetapi karena faktor lain.

Semakin tinggi nilai ICOR membawa dampak semakin tingginya kebutuhan investasi. Berdasarkan hal di atas, kebutuhan investasi untuk masing-masing kategori disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10.9  
Kebutuhan Investasi 2017-2021 (Juta Rupiah), dengan ICOR=6.8

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>					
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	30278.28719	31308.07945	32372.89589	33473.92771	34612.40662
a. Tanaman Pangan	-	-	-	-	-
b. Tanaman Hortikultura	642.1541956	646.7837361	651.4466528	656.1431864	660.873579
c. Perkebunan	26.62984638	27.18265092	27.74693103	28.32292494	28.91087582
d. Peternakan	30473.57232	31697.83397	32971.27976	34295.88565	35673.70696
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	1220.586946	1295.56693	1375.152893	1459.627778	1549.291909
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	-	-	-	-
3. Perikanan	22.02702873	22.16384318	22.30150741	22.4400267	22.57940636
<b>Pertambangan dan Penggalian</b>					
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
3. Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	-	-	-	-	-
<b>Industri Pengolahan</b>					
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
2. Industri Makanan dan Minuman	456884.6313	497648.1343	542048.5799	590410.4581	643087.2103
3. Pengolahan Tembaku	95202.03216	98368.08178	101639.4219	105019.5541	108512.0964
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	280904.5372	300018.9817	320434.0888	342238.3632	365526.3325
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	32833.30612	35654.45575	38718.00818	42044.79148	45657.42334
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Bar	17364.03951	18091.33048	18849.08395	19638.57585	20461.13553
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	15153.36251	15384.31555	15618.78856	15856.83518	16098.50988
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	28551.57649	32025.25061	35921.5428	40291.87008	45193.90505
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	38861.97367	40903.25769	43051.76325	45313.12231	47693.26269
10. Industri Barang Galian bukan Logam	1593.562871	1670.253684	1750.63527	1834.885251	1923.189794
11. Industri Logam Dasar	270.2506663	283.6677421	297.7509325	312.533308	328.0495809
12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	25429.22167	27160.97269	29010.65739	30986.30715	33096.50028
13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	9606.573722	10186.23168	10800.86604	11452.58726	12143.63316
14. Industri Alat Angkutan	697.0989008	741.719352	789.195904	839.7113722	893.460274
15. Industri Furnitur	6578.101876	6976.133608	7398.249683	7845.90741	8320.65228

Sumber: data diolah

Besarnya investasi di atas dapat diimplementasikan melalui kebijakan yang dirancang secara komprehensif dan integratif antar OPD terkait. Hal ini perlu dilaksanakan mengingat setiap kategori atau subkategori memiliki potensi yang berbeda. Selain itu, prioritas dapat dipertajam lagi melalui kriteria-kriteria tertentu dalam rangka lebih memastikan dampak investasi daerah dalam rangka mencapai target pendapatan per kapita sesuai RPJMD Kota Surakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, penting bagi Kota Surakarta untuk merancang skala prioritas pemenuhan kebutuhan investasi berdasarkan ketentuan atau kriteria yang dirumuskan, seperti kriteria ketenagakerjaan, penggunaan sumberdaya, komoditas, lokasi, dan sebagainya. Kebijakan investasi memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan lain, sehingga akan lebih optimal hasilnya apabila dikaitkan dengan kebijakan kemudahan dan insentif, serta kebijakan yang mendukung program *ease of doing business* (EoDB) yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah saat ini.

## G. Penutup

Berdasarkan hasil kajian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kategori-kategori unggulan di Kota Surakarta adalah kategori konstruksi dan perdagangan, real estate, angkutan rel (kereta api), penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa perusahaan, jasa pendidikan, serta kesehatan. Kategori-kategori tersebut memiliki kontribusi yang lebih besar daripada kategori-kategori yang lain.
2. Kebutuhan investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta apabila diukur dengan menggunakan ICOR maka nilainya 6,8. Angka ini menunjukkan bahwa untuk tumbuh 1 rupiah maka dibutuhkan investasi 6,8 rupiah. Bila dibandingkan dengan angka ICOR Indonesia, Kota Surakarta tergolong lebih tinggi. Kategori perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasi membutuhkan investasi sebesar 300 Miliar per tahun. Adapun perdagangan besar eceran membutuhkan investasi 2,5 hingga 3 trilyun per tahun. Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum membutuhkan investasi sebesar 650 Miliar per tahun.

## H. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian kebutuhan investasi, dapat direkomendasikan untuk:

1. Mempertahankan kategori-kategori unggulan di Kota Surakarta dengan mengakomodasi perkembangan teknologi informasi (*smart city*).
2. Meningkatkan daya saing industri khususnya pada kategori yang terspesialisasi namun belum kompetitif. Upaya yang dilakukan antara lain: Inovasi kreativitas, memperkuat infrastruktur ekonomi daerah, memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi, memetakan potensi ekonomi, mengurangi inefisiensi.
3. Membuat iklim investasi yang lebih baik dengan meningkatkan pelayanan publik yang transparan.

## REFERENSI

- Antara, Made. 2007. Analisis kebutuhan investasi kategori basis dan non basis dalam perekonomian regional Bali. *Jurnal SOCA*, Vol. 7, No.2.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Jawa Tengah dalam angka 2016*.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Surakarta dalam Angka 2016*. Surakarta
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Profil Ketenagakerjaan 2016*. Surakarta
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah 2016*. Semarang.
- Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Daerah. 2008. *ICOR Kabupaten Bandung Tahun 2008*. Kabupaten Bandung.
- Bank Indonesia. 2009. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Jawa Tengah*. Vol. 9 No.10 ISSN 1411-7363. Semarang: Kantor Bank Indonesia.
- Halim, Abdul. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Kategori Publik Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Imelia, Amelia. 2006. *Modul Ekonomi Regional*. Fakultas Ekonomi Universitas Jambi.
- Irawan, dan Suparmoko. 1997. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Hanani, Nuhfil dan Iwan Nugroho. 2004. Kebutuhan Investasi untuk Pengembangan Kategori Pertanian: Suatu Pendekatan *Input-Output*. *Jurnal AGRIVITA*, Vol.26, No.2.
- Jhingan, M.L. 1988. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali.
- Nugroho, Iwan. 2007. Pengembangan dan Kebutuhan Investasi Kategori Air Bersih Di Propinsi Jawa Timur. *Jurnal Litbang Kebijakan*, Vol.1
- Nugroho, Iwan dan Nuhfil Hanani. 2007. Studi Investasi untuk Pengembangan Komoditi Pertanian di Propinsi Lampung: Pendekatan input-output. *Jurnal Ekonomi*, Vol.12, No.1.

- Purwanti, Putu Ayu P. 2009. Analisis Kesempatan Kerja Kategorial di Kabupaten Bangli Dengan Pendekatan Pertumbuhan Berbasis Ekspor. *Jurnal Piramida*, Vol.V, No.1.
- Simanjuntak, Payaman S. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE UI.
- Sobri. *Ekonomi Makro*. 1987. Yogyakarta: BPFU Universitas Islam Indonesia. Sukirno, Sadono. 1976. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta: LPFE UI.
- Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Swasono, Yudo, Endang S. 1987. *Metode Perencanaan Tenaga Kerja*. Yogyakarta: BPFU.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.